BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi saat ini berkembang sangat pesat dan mempunyai dampak yang besar dalam meningkatkan efektifitas dan keefisienan dalam melakukan setiap pekerjaan. Untuk menunjang kegiatan teknologi informasi, dibutuhkan sebuah perangkat yaitu komputer [5]. Dengan adanya komputer yang terus berkembang pada saat ini memberikan keuntungan yang lebih bagi perusahaan atau instansi karena beberapa pekerjaan menjadi lebih mudah dan dapat menghemat waktu [4].

Salah satu contoh perkembangan teknologi informasi saat ini yaitu sistem informasi. Sistem informasi merupakan sekumpulan aturan pengumpulan informasi yang secara sistematis dan terstruktur. Informasi adalah sekumpulan data baik bertipe sama maupun berbeda yang dikumpulkan dengan metode tertentu. Pengumpulan data sistem informasi pada zaman dahulu masih menggunakan cara manual, namun kini sistem tersebut telah berubah menjadi sistem berbasis komputer, dengan menggunakan aplikasi berbentuk *Desktop*, *Web*, atau *Mobile* [2]. Didalam sistem informasi juga tidak lepas dari yang namanya *User Interface* (UI). User interface merupakan tampilan visual dalam sebuah aplikasi atau web sebagai tempat (media) untuk menghubungkan antara sistem dengan user [7]. Pembuatan *User Interface* bertujuan untuk menjadikan teknologi informasi tersebut mudah digunakan oleh pengguna. Seprti halnya sistem informasi yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banyumas memiliki sistem informasi yang digunakan untuk monitoring kegiatan dan sebagai wadah untuk pegawai melakukan segala laporan serta pemberkasan yang terjadi pada lingkungan kerja internal BPS Kabupaten Banyumas [6]. Sistem informasi tersebut dinamakan MONIKA (Monitoring Kegiatan). Sistem informasi tersebut dipasang pada jaringan lokal BPS yang bertujuan agar para pegawai

BPS dapat mengakses dan menggunakannya dalam bekerja. Sistem tersebut sangat bermanfaat dan berguna bagi pegawai BPS Kabupaten Banyumas karena pekerjaan yang ada seperti contohnya pemberkasan file-file dapat dilakukan dengan mudah dan cepat sehingga dapat mengefisiensi pekerjaan yang ada. Sistem informasi tersebut memang sangatlah mempermudah pekerjaan para pegawai BPS, namun sistem informasi tersebut belum sepenuhnya sempurna. Berdasarkan wawancara penulis dan rekan-rekan PKL dengan pihak BPS Kabupaten Banyumas, membutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat membuat sebuah surat izin serta dapat memantau dan mencatat informasi izin keluar masuk dari para pegawainya.

Izin keluar kantor merupakan salah satu kegiatan yang membutuhkan pengwasan. Kegiatan tersebut membutuhkan pencatatan sebagai bukti jika terdapat suatu masalah di masa kedepannya. Oleh karena itu, penulis membantu pembangunan sistem pada bagian tampilan menggunakan *framework* bootstrap. Hal ini untuk mendukung sistem yang akan dibangun oleh rekan PKL menggunakan Bahasa pemrograman web lainnya.

B. Tujuan

- 1. Tujuan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
 - a. Menerapkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang telah dipelajari selama masa kuliah ke dunia kerja khususnya tempat pelaksanaan PKL sebagai langkah untuk berkontribusi membantu pemecahan masalah di instansi terkait.
 - Melatih komunikasi, interkasi serta koordinasi antar sesama mahasiswa, dosen pembimbing lapangan maupun dari pihak institusi tempat pelakasanaan PKL.
 - c. Memberikan gambaran mengenai dunia kerja yang akan dihadapi mahasiswa setelah lulus dari Perguruan Tinggi.
 - d. Membentuk karakter individu untuk pengembangan softskill dan hardskill.
 - e. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk lulus dari perguruan tinggi.

2. Tujuan Pembuatan Laporan

- a. Sebagai salah satu syarat untuk melengkapi mata kuliah Kerja Praktik Program Studi S1 Informatika Institut Teknologi Telkom Purwokerto.
- b. Mengasah pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan dalam membuat sebuah laporan kerja.
- c. Sebagai penilaian akademik tentang pelaksanaan kegiatan PKL di institusi terkait.
- d. Sebagai evaluasi atau kesimpulan dari hasil yang telah dilakukan pada tempat pelaksanaan PKL.

3. Tujuan Pembuatan Sistem Informasi

Tujuan dari pembuatan Sistem Informasi Izin Keluar Masuk Pegawai Berbasis *Website* adalah untuk mempermudah pihak instansi dalam membuat dan mengatur izin keluar masuk dari para pegawai Badan Pusat Statistik Banyumas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelakasanaan PKL penulis yaitu ditempatkan pada bagian Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS). Penulis membantu pekerjaan pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas seperti membuat sebuah desain infografis 27 kecamatan dalam rangka publikasi Kecamatan Dalam Angka (KDA) tahun 2021 serta penulis juga membantu pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas dalam menginputkan dan mengoreksi sebuah data. Penulis juga diberikan sebuah projek besar yaitu membuat sebuah sistem informasi berbasis web untuk izin keluar masuk pegawai dan membuat sebuah aplikasi android untuk menampilkan informasi berupa data dan statistik Kabupaten Banyumas. Pada pembuatan sistem informasi penulis mendapatkan bagian untuk membuat sebuah user interface atau tampilan dari website menggunakan framework bootstrap. Lalu pada pembuatan aplikasi android penulis hanya mendapatkan tugas untuk merapikan tampilan saja. Pada pembuatan aplikasi android ini belum sepenuhnya jadi karena keterbatasan waktu PKL. Aplikasi yang dibuat hanya dapat menampilkan data statis saja belum terhubung dengan database serta tampilan dari aplikasi yang belum sepenuhnya bagus.

D. Aspek Umum dan Kelembagaan

1. Profil Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindak lanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik [3]. Pada Gambar 1.1 merupakan logo dari Badan Pusat Statistik.



Gambar 1.1 Logo BPS

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

- Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
- Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
- Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

 Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

- Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
- Membantu kegiatan statistik di kementrian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
- Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
- Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

2. Visi dan Misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.

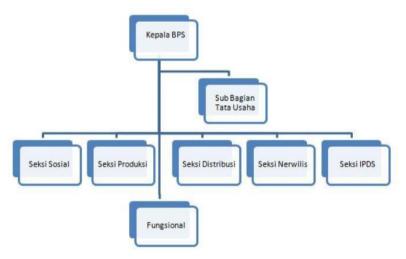
Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah:

"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju"

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang

- a. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.
- b. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan.
- c. Mewujudukan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional.
- d. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah [3].
- 3. Struktur Badan Organiassi Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPS Kabupaten Banyumas

Gambar 1.2 Merupakan Gambar Struktur organisasi dari Badan Pusat Statistik. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Susunan organisasi BPS terdiri dari:

 Kepala yang mempunyai tugas memimpin BPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai

- dengan tugas BPS; menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPS yang menjadi tanggung jawabnya; serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain. Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, 5 (lima) Deputi dan Inspektorat Utama.
- b. Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS. Sekretariat Utama terdiri dari beberapa Biro, setiap Biro terdiri dari beberapa Bagian dan setiap Bagian terdiri dari beberapa Subbagian. Sekretariat Utama terdiri dari Biro Bina Program, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Biro Umum.
- c. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik terdiri dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Direktorat Diseminasi Statistik, dan Direktorat Sistim Informasi Statistik.
- d. Deputi Bidang Statistik Sosial mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial. Deputi Bidang Statistik Sosial terdiri dari Direktorat Statistik Kependudukan & Ketenagakerjaan, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, dan Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.
- e. Deputi Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi. Deputi Bidang Statistik Produksi terdiri dari Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura & Perkebunan, Direktorat Peternakan, Perikanan & Kehutanan dan Direktorat Statistik Industri.
- f. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Jasa mempunyai

tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa. Deputi Bidang Statistik Distribusi & Jasa terdiri dari Direktorat Statistik Harga, Direktorat Statistik Distribusi, dan Direktorat Statistik Keuangan, TI & Pariwisata.

- g. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik terdiri dari Direktorat Neraca Produksi, Direktorat Neraca Pengeluaran, dan Direktorat Analisis & Pengembangan Statistik.
- h. inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.
- j. Instansi Vertikal terdiri dari BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.

E. Metode Penulisan Laporan

1. Metode Diskusi.

Metode yang dilakukan antara penulis dengan rekan-rekan PKL atau dengan pihak BPS Kabupaten Banyumas untuk melakukan diskusi mengenai permasalahan yang ada guna untuk mencari solusi atau penyelesaian tersebut.

2. Metode Kajian Pustaka.

Metode ini dilakukan dengan melakukan studi Pustaka pada penelitian terdahulu, jurnal, buku atau prosiding guna mencari dasar pengetahuan yang valid sehingga laporan yang ada dapat disusun dan ditulis dengan baik

sesuai dengan literasi yang ada.

3. Metode Wawancara.

Metode tanya jawab yang dilakukan penulis dan rekan-rekan PKL dengan pihak BPS Kabupaten Banyumas untuk mencari permasalahan yang ada serta juga memberikan solusinya.

F. Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penyusunan dan penulisan laporan PKL ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang bertujuan agar mempermudah para pembaca dalam memahami laporan ini. Bagian-bagian tersebut antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan gambaran umum mengenai pokok bahasan dalam PKL seperti latar belakang, tujuan, ruang lingkup, aspek umum dan kelembagaan, metode penulisan laporan dan sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang dasar-dasar teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam laporan PKL.

BAB III IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang penjelasan hasil sistem informasi yang dibangun serta penjelasan tentang laporan hasil pekerjaan saat melakukan PKL di BPS Kabupaten Banyumas.

BAB IV PENUTUP

Berisikan tentang kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah melakukan Praktik Kerja Lapangan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas dan berisikan saran baik ditujukan kepada tempat pelaksanaan PKL maupun kepada instansi yang menggunakan sistem informasi yang dibangun.